BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment"* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" yang berarti memiliki atau mempunyai daya. Daya berarti kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Namun pada perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna *empowerment* tersebut. *Empowerment* pada umumnya diterjemahkan kedalam istilah "pemberdayaan". Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Adapun pengertian pemberdayaan menurut Suharto dalam bukunya *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, sebagai berikut:

> "Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkainkegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social". (Suharto, 2010:59-60)

Pengertian di atas bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga lebih kuat dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Kemampuan masyarakat Kelurahan Cibeureum dalam mengelola sampah dengan memanfaatkannya menjadi sesuatu hal yang berguna perlu dukungan pihak pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi.

Pengertian pemberdayaan menurut Prijono yang menganalisa pengertian pemberdayaan (*empowerment*), yaitu:

> "Pemberdayaan merupakan sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan. Disamping itu pemberdayaan juga memiliki makna melindungi dan membela dengan cara berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah". (Prijono, 1996:97)

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dengan masyarakat, organisasi dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya. Hasil dari penguasaan kehidupan sendiri dapat menghasilkan masyarakat yang mandiri sehingga menjadi masyarakat yang lebih kuat dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi disekitarnya. Pengertian lain pemberdayaan menurut Pranaka dan Moeljarto, yaitu:

> "Pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi". (Pranarka, 1996:56).

Konsep permberdayaan sebagaimana didefinisikan oleh Pranarka dan Moeljarto merupakan suatu uasaha yang dilakukan untuk membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi lebih baik. Sekelompok orang yang dimaksud merupakan masyarakat yang mempunyai kemauan untuk lebih beradab dan adil dalam menjalankan kehidupannya.

Adapun pengertian pemberdayaan menurut Kiesberg yaitu sebagai berikut:

> "*Empowerment involves individuals gaining control of their lives and fulfilling their need in part, as a result of developing competencies, skills and abilities necessary to effectively participate in their social and political worlds."* (Kiesberg, 1992:19).

Pengertian pemberdayaan menurut pendapat di atas merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya agar lebih berkompetensi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan mempunyai tujuan unuk meningkatkan kemampuan untuk berpatisipasi din dunia sosial dan politik secara efektif.

Definisi pemberdayaan dikemukakan oleh Wasistiono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sebagi berikut: "pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya." (Wasistiono,1998:46).

Berdasarkan pendapat di atas, pemberdayaan merupakan perubahan kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik. Pencapaian kebebasan dengan cara mengendalikan yang tadinya kaku menjadi produktif yakni seseorang yang asalnya tidak mempunyai kemampuan menjadi lebih berkompeten dengan mempertanggung jawabkan semua tindakannya. Selanjutnya menurut Mustafa

mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut: “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menambah, meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan, sikap, dan keterampilan penduduk agar meningkat taraf kehidupannya”. (Mustafa, 2008:74).

Pengertian pemberdayaan dari definisi tersebut merupakan suatu upaya yangdilakukan dengan cara meningkatkan potensi yang ada. Seperti pengetahuan seseorang, sikap dalam menjalankan kehidupannya dan keterampilan menghasilkan produk dan jasa yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

2.1.1.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Berdasarkan pengetian tersebut, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Istilah masyarakat berasal dari akar kata Arab “*syaraka*” yang berarti ikut serta (berpartisipasi). Dalam bahasa inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan, berikut definisi masyarakat menurut Soeharto, yaitu:

> “Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, dan

> kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama". (Suharto, 2010:47)

Berdasarkan definisi di atas, dengan adanya persamaaan yang dimiliki maka akan membentuk suatu kelompok yang memiliki prinsip yang sejalan. Dari persamaan yang ada, maka akan membentuk sebuah kekuatan yang dibangun satu sama lain. Sejalan dengan Selo Sumardjan dalam bukunya yang berjudul Setangkai Bunga Soisologi, yaitu: "masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan".(Sumardjan, 1964:115)

Persamaan yang dimiliki pada setiap individunya dapat menghasilkan sebuah kebudayaan yang menjadi identitas pada suatu sekelompok masyarakat. Kebudayaan mencakup aspek pengetahuan, kesenian, adat istiadat, hukum dan lain-lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Koentjaraningrat menjabarkan definisi "masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue* dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama". (Koentjaraningrat, 1994:329). Berdasarkan pendapat tersebut, kesamaan identitas tersebut yang kemudian menjadikan sekelompok manusia atau masyarakat menjadi sebuah kekuatan yang diabdikan kepada masyarakat lainnya untuk keperluan bersama. Sistem adat dan istiadat tersebut dilaksanakan secara turun temurun dan dengan keterikatan satu sama lain agar kebudayaan yang telah ada dapat tetap dijaga. Masyarakat menurut Alimandan dalam buku *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, menjelaskan:

> "Pengertian masyarakat dengan istilah *Community,* dimana istilah tersebut menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok itu disebut masyarakat" (Alimandan, 1985:3).

Berdasarkan pendapat di atas, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan mereka. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang menjelaskan:

> "Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung" (UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Berdasarkan pengertian di atas, masyarakat merupakan sekelompok orang maupun penduduk yang hidup bersama dalam suatu tempat dan dirasa dapat memenuhi kepentingan hidup bersama serta berkedudukan sebagai pihak yang menerima manfaat pelayanan publik.

Menurut Soerjono Soekanto alam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini :

1. Beranggotakan minimal dua orang.
2. Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan.
3. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat.
4. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

(Soekanto, 2006:71)

Berdasarkan uraian di atas faktor kesatuan dan persamaan dalam masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan berjalannya sebuah

masyarakat yang kemudian menimbulkan suatu kebudayaan yang menjadi identitas kuat di dalamnnya. Hubungan dalam waktu yang cukup lama dapat membuat suatu komunikasi yang sejalan karena adanya kebiasaan-kebiasaan sehingga menghasilkan sebuah peratura-peraturan kesepakatan antar anggota masyarakat untuk menjadi sebuah masyarakat yang baik.

Adapun beberapa fungsi masyarakat menurut Suharto adalah:

1. Penyedia dan pendistribusi barang-barang dan jasa
2. Lokasi kegiatan bisnis dan pekerjaan
3. Keamanan publik
4. Sosialisai
5. Wadah dukungan bersama atau gotong royong
6. Kontrol sosial
7. Organisasi dan partisipasi politik

(Suharto, 2010:47)

Definisi mengenai fungsi masyarakat ini merupakan hasil dari adanya persamaan yang ada sehingga membuat suatu fungsi bagaimana masyarakat itu berguna bagi satu sama lain. Masyarakat berfungsi sebagai wadah dukungan bersama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai bersama.

Tujuaan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Namun demikian, untuk memberdayakan, masyarakat memerlukan rangkaian proses panjang, agar mereka menjadi lebih berdaya.

Berdasarkan uraian pengertian mengenai pemberdayaan dan masyarakat, maka menurut Sunyoto Usman mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: “Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha

memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian" (Sunyoto, 2008:30). Berdasarkan uraian tersebut dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut. Serta diperlihatkan strategi pemanfaatan berbagai *resources* yang dimiliki dan dikuasai. Pada proses tersebut, masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaimana membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil yang optimal.

Sedangkan mengenai unsur-unsur pemberdayaan masyarakat, menurut Suhendra unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Kemauan politik yang mendukung
2. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh
3. Motivasi
4. Potensi masyarakat
5. Peluang yang tersedia
6. Kerelaan mengalihkan wewenang
7. Perlindungan
8. *Awarness* (kesadaran)

(Suhendra, 2006: 87)

Hal diatas menunjukkan bahwa unsur pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk rencana kegiatan yang realistis. Yang ditunjukkan dengan adanya sasaran, kebijaksanaan maupun prosedur pelaksanaan yang jelas. Berdasarkan pada unsur pemberdayaan masyarakat yang baik tersebut, maka hendaknya dalam perumusan program pemberdayaan memperhatikan hal-hal tersebut di atas. Supaya program pemberdayaan yang dilakukan bisa mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Pemberdayaan itu sendiri merupakan suatu gerakan yang harus dilakukan secara terus-menerus sampai mencapai titik pada kemandirian masyarakat. Hal inipun sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Suhendra, bahwa ”pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*)”. (Suhendra, 2006: 77). Pemaparan diatas menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, dalam hal ini pemberdayaan dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R di Kelurahan Cibeureum.

Pengertian pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan oleh Soetomo dalam bukunya yang berjudul sebagai berikut: ”Pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat teutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya” (Soetomo, 2011:69).

Berdasarkan pengertian diatas menyebutkan bahwa masyarakat memiliki wewenang yang lebih besar. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanan evaluasi dan menarik manfaat dari hasil pembangunan. Di samping akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut, masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya.

2.1.1.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan dan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkain kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik. Adapun prinsip pemberdayaan masyarakat, Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 (lima) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

(Sumaryadi, 2005: 94-96)

Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam

komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukandalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Beberapa prinsip mengenai pemberdayaan masyarakat juga dikemukakan oleh Suharto dalam *Analisa Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, sebagai berikut:

a. Membangun relasi pertolongan yang: (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination); (3) menghargai perbedaaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien (client partnership)
b. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan professional; riset dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

(Suharto, 2005:68)

Uraian di atas menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat menempatkan dirinya sebagai actor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang ada disekitarnya. Tingkat kepekaan terhadap satu sama lain dalam menghadapi sebuah masalah sangat dibutuhkan dalam sebuah aktivitas pemeberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Cibeureum juga dibutuhkan kepekaan satu sama lain. Seperti masalah dalam membuang sampah sembarangan

yang sudah menjadi budaya di Indonesia, maka dari masalah tersebut jika masyarakat Kota Cimahi secara luas memiliki tingkat kesadaran dan kepekaan dengan mengganti pola pikir dengan bagaimana sampah yang pada dasarnya tidak memiliki nilai kemudian dapat dirubah menjadi suatu barang yang dapat berguna. Kesadaran dan kepekaan yang demikian yang harus ditanamkan dalam prinsip pemberdayaan masyarakat.

2.1.1.4 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Sebuah Proses

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving's force*) sosial-ekonomi, politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai "*power*" (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*). Secara konseptual dikemukakan oleh Saraswati, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

a. *Learning by doing*, artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
b. *Problem solving*, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara an waktu yang tepat.
c. *Self-evaluation*, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evalusi secara mandiri.
d. *Self-development and coordination*, artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
e. *Self-selection,* suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan.
f. *Self-decisim,* dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (*self-dicism*)

(Saraswati, 1997: 79-80).

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara berkesinambungan, maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat. Apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi *feedback* yang baik, sehingga upaya pemberdayaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik dan dapat membangun ekonomi masyarakat serta mengembangkan diri sehingga tercapai tujuan yang lebih besar.

Pandangan Kartasasmita memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dari dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan:

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
b. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
c. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

(Kartasasmita, 1996: 11-12)

Berdasarkan uraian diatas titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam rangka memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana, tetapi meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.

2.1.2 Pengelolaan Sampah

2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan dengan merencanakan dan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. definisi pengelolaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), dalam *www.stialan.ac.id* adalah sebagai berikut:

> Pengelolaan adalah proses dari keseluruhan usaha atau kegiatan, meliputi:
> a. memikirkan dan menentukan berbagai hal yang bersangkutan dengan apa-apa yang dilakukan.
> b. mengusahakan, mengatur, menggerakkan dan memanfaatkan sumber-sumber baik yang berupa manusia, yang diperlakukan untuk pencapaian tujuan.
> c. menjamin agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kegagalan pencapaian tujuan"
> (*www.stialan.ac.id*)

Pengertian pengelolaan dari pendapat di atas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan suatu

organisasi. Tujuan dari pengelolaan itu sendiri untuk membantu kebijaksanaan suatu organisasi dengan memanfaatkan tenaga orang lain.

Beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghendaki tercapainya suatu tujuan baik dari sebuah organisasi maupun dari suatu kegiatan. Dengan kata lain pengelolaan merupakan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diterapkan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Istilah pengelolaan sendiri menurut Stoner dan Wankel yang dikutip oleh Suwardjoko P. Warpani, adalah: "kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi." (Warpani, 2002: 24). Berdasarkan pendapat tersebut pengelolaan merupakan suatu proses untuk mengendalikan yang dilakukan untuk memulihkan barang yang sudah tidak terpakai.

Menurut Dadang Solihin dan Putut Marhayudi, menyatakan:

> "Pengelolaan tempat milik daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan." (Solihin, 2002:229)

Kutipan di atas memberikan penjelasan bahwa pengelolaan merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Kegiatan tersebut berdasarkan taat terhadap peraturan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien secara tertib.

2.1.2.2 Pengertian Sampah

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dapat merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Adapun pengertian samaph menurut Undang-Undang No 18 tahun 2008 adalah: ”Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. (UU No. 18-2008). Berdasarkan pengertian tersebut sampah merupakan sisa dari bentuk limbah atau barang buangan yang tidak terpakai lagi oleh manusia yang berbentuk padat.

Segala macam organisme yang ada di alam ini selalu menghasilkan limbah atau bahan buangan atau yang dapat juga kita sebut sampah. Semakin majunya peradaban, menambah jenis limbah atau sampah dalam kehidupan kita. Sampah itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sampah Organik
   Jenis sampah daratan yang dapat didegradasi atau dipecah oleh mikroorganisme, menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam tanpa menimbulkan pencemaran pada lingkungan.
2. Sampah Anorganik
   Jenis sampah daratan yang tidak dapat didegradasi atau dipecah oleh mikroorganisme, dan tidak dapat menjadi bahan yang mudah menyatu kembali dengan alam.

(Wardhana, 2004:99-100)

Pengertian di atas tersebut sampah terbagi menjadi dua kategori pertama sampah organik yaitu sampah yang mudah menyatu kembali dengan alam dengan sendirinya dapat melebur tanpa menimbulkan pencemaran. Kedua sampah anorganik merupakan sampah yang tidak bisa melebur dengan alam, biasanya sampah jenis tersebut dapat digunakan kembali menjadi barang yang berguna.

Penumpukan sampah yang tidak terkendali dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan. Pengendalian sampah sangat diperlukan untuk mengurnagi dampak buruk tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan cara pengelolaan sampah yang baik, oleh karena itu peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat menjadi tuntutan yang harus dilakukan bersama.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka disimpulkan menurut Kuncoro Sejati dalam ukunya yang berjudul *Pengolahan Sampah Terpadu*, sebagai beikut: "Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir" (Kuncoro, 2009:24). Pengelolaan sampah yang baik dilakukan sejak ditimbulkan sampah sampai akhir pembuangan. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian tmbulan sampah pengumpulan sampah, transfer dan tranpor, pengolahan, dan pembuangan akhir.

Tertera dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 definisi pengelolaan sampah adalah: **"**Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah". (UU No. 18 Thn 2008). Berdasarkan pengertian di atas pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dilakukan secara terus menerus meliputi penanganan yaitu memanfaatkan sampah menjadi barang yang dapat digunakan. Pengeloaan sampah melalui Program 3R yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi mempunyai manfaat yang besar, dan turut mendukung menuju masyarakat yang mandiri.

2.1.2.3 Jenis-Jenis Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 terdiri atas:

a. Sampah rumah tangga
   Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga
   Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasanindustri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
c. Sampah spesifik
   Sampah spesifik meliputi:
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
   c. sampah yang timbul akibat bencana;
   d. puing bongkaran bangunan
   e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan
   f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

(UU No. 18 Tahun 2008)

Berdasarkan pengertian di atas bahwa jenis sampah yang dikelola ada 3 (tiga) jenis yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Ketiga jenis sampah tersebut dikelola berdasarkan asas tanggung jawab dari penghasil sampah, sehingga jika dikelola dengan baik dapat menjadi barang yan bermanfaat dan memiliki nilai jual. Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dan dukungan pemerintah, untuk mengelola sampah dengan efektif.

Menurut Cunningham (2004) tahap pengelolaan sampah modern terdiri dari 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebelum akhirnya dimusnahkan atau dihancurkan. Adapun pengertian 3R sebagai berikut:

1. *Reduce* (mengurangi)
2. *Reuse (*menggunakan kembali)
3. *Recycle* (mendaur ulang)

(Cunningham, 2004:57)

Berdasarkan pengertian di atas Penanganan sampah 3R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan sampah.

Selanjutnya penjelasan mengenai pengertian 3R dikemukakan oleh Soedrajat, sebagai berikut:

1. *Reduce* berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan.
2. *Reuse* berarti menggunakan kembali. Prinsip reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.
3. *Recycle* berarti mendaur ulang, Prinsip recycle dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.

(Soedrajat, 2008: 45)

Dari uraian diatas pengelolaan sampah dengan Program 3R merupakan cara yang efektif dalam pengelolaan sampah jiga dilakukan dengan sungguh-sungguh khususnya oleh masyarakat yang merupakan penghasil sampah paling produktif. Pada pelaksanaan dilapangan, pengelolaan sampah juga mengalami hambatan. Hambatan terbesar yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang hanya membuang saja tanpa memilah terlebih dahulu.

2.1 Kerangka Pemikiran

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di

lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual Sumber Daya Manusia (SDM), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

Beragam definisi pemberdayaan tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Pengertian pemberdayaan enurut Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,* pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Pengembangan potensi
2. Kemampuan
3. Perlindungan
4. Dukungan
5. Pemeliharaan

(Soeharto, 2010: 67-68)

Sejalan dengan penjelasan pemberdayaan masyarakat di atas, adapun hal lain yang **Pertama**, pengembangan potensi adalah diartikan untuk menciptakan suasan atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural yang menghambat. Pengembangan potensi terdiri dari pengetahuan, motivasi dan kultural. Fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain model (contoh), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun konsesus bersama, serta melakukan manajemen sumber. Program penanganan masalah sosial pada umumnya diberikan anggota masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber, baik karena sumber tersebut tidak ada di sekitar lingkungannya, maupun karena sumber-sumber tersebut sulit dijangkau karena alasan dan faktor ekonomi birokrasi.

Kedua, kemampuan merupakan memperkuat kemampuan yang dimiliki masyarakat Kelurahan Cibeureum dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat Kelurahan Cibeureum dalam mengelola sampah melalui Program 3R. Fungsi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihann guna memperkuat kapasitas masyarakat. Kemampuan berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat.

Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang

berkaitan dengan fungsi kemampuan. Semua pertukaran informasi pada dasarnya merupakan bentuk pendidikan. Fungsi pendidikan lebih menunjuk pada sebuah proses kegiatan daripada sebuah hasil kegiatan. Pelatihan memiliki potensi dan sumber yang dapat digunakan dalam proses belajar. Pada akhirnya kemampuan yang didukung dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat merujuk pada proses pemberdayaan yang baik pula.

Ketiga, perlindungan merupakan kegiatan melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya ekploitasi kelompok kuat tehadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Perlindungan memiliki fungsi yang sebagai pembelaan terhadap kelompok yang lemah dan tidak berdaya, sehingga pemberdayaan didasarkan pada memberdayakan suatu masyarakat yang lemah sehingga memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi eksternal maupun internal. Perlindungan merupakan juga

mempunyai fungsi sebagai konsultan, yakni sebagai pemecahan masalah. Konsultasi pemecahan masalah tidak hanya berupa pemberian dan penerimaan saran-saran, melainkan merupakan proses yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai piihan-pilihan dan mengidentifikasi prosedur-prosedur bagi tindakan-tindakan yang diperlukan.

Keempat, dukungan merupakan memberikan bimbingan dan penyediaan agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha, dukungan terdiri dari keterampilan dasar, komunikasi dan sumber dana.

Dukungan mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Dukungan dituntut tidak hanya mampu menjadi fasilitator yang ada, melainkan mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai keterampilan dasar, komunikasi, dan dalam hal mengatur sumber dana.

Kelima, pemeliharaan merupakan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Pemeliharaan terdiri dari perhatian dan pembinaan. Pemeliharaan berfungsi untuk memelihara keadaan yang kondusif agar tetap terjadi suatu keadaan yang seimbang antara berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjain keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan memandirikan, mengembangkan dan memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.
2. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki persamaan identitas, kepentingan-kepentingan yang sama dalam satu tempat yang sama yaitu Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan program 3R yang terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut:
    1) Pengembangan potensi adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah. Adapun pengembangan potensi tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
        a. Pengetahuan adalah hasil dari proses pengalaman masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.

b. Motivasi adalah dorongan semangat masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.

c. Kultur adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cibeureum dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.

2) Kemampuan adalah memperkuat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R. Faktor yang mempengaruhi kemampuan yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan adalah tingkat kecerdasan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.

b. Pelatihan adalah upaya aparatur Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Kelurahan Cibereum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.

3) Perlindungan adalah upaya yang dilakukan aparatur Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi untuk melindungi masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi guna menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Konsultasi adalah suatu aktivitas bertukar pikiran dalam rangka memecahkan masalah dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R di Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi.

4) Dukungan adalah memberikan bimbingan dan penyediaan yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi kepada masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R. Dukungan terdiri dari:
    a. Keterampilan dasar adalah kemampuan yang dimiliki masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.
    b. Komunikasi adalah keterkaitan interaksi masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.
    c. Sumber dana adalah biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah melalui Program 3R.
5) Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah guna menciptakan kondisi yang kondusif, keselarasan dan keseimbangan masyarakat Kelurahan. Faktor pendukung pemeliharaan sebagai berikut:
    a. Perhatian adalah sikap masyarakat Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi dalam kepekaan terhadap pengelolaan sampah melalui Program 3R.

b. Pembinaan adalah upaya aparatur Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi kepada masyarakat Kelurahan Cibeureum tentang bagaimana cara mengelola sampah melalui Program 3R.

Berikut ini merupakan bagan yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk memperjelas sebagai bahan tambahan dari penjelasan teoritik pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas:

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran

